



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan K.H. Abdul Halim Nomor 97 Majalengka 45418
Email: diskominfo@majalengkakab.go.id Website: www.diskominfo.majalengkakab.go.id

BERITA ACARA
NOMOR : 000.8.3.4/BA.2/IKP/2026

**HASIL UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2026**

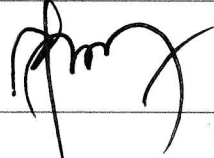
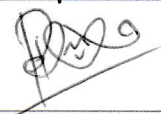
Pada hari ini, Kamis tanggal 4 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami telah melaksanakan uji konsekuensi dimana setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan,

Bahwa setiap Perangkat Daerah dan Kecamatan di Kabupaten Majalengka wajib membuka akses bagi setiap pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali sebagai berikut :

1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakkan hukum;
2. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengganggu hubungan luar negeri;
7. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengungkapkan rahasia pribadi;
9. Memorandum atau surat-surat badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang; dan
11. Hasil dari pembahasan Daftar Informasi yang Dikecualikan Perangkat Daerah dan Kecamatan, harus ada keseragaman format awal serta cakupan dokumennya disesuaikan dengan uraian tugas masing-masing.

Demikian uji konsekuensi tersebut yang ditandatangani oleh Tim Uji Konsekuensi, selanjutnya Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat sebagai dasar Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2026.

**TIM UJI KONSEKUENSI
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026**

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Irwan, ST., S.Kom., M.M.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.	Vidi Adhitama, SE., M.A.P.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
3.	Kusmiati, S.Sos	Kepala Bidang IKP	
4.	Maya Puspita, SE., M.M.	Arsiparis Ahli Muda	
5.	Suratman, SH.	Analisis Hukum Ahli Muda	
6.	Wondi Muhamad Yusuf, ST.	Pranata Humas Ahli Muda	
7.	Putri Wahyu Fatmawati, S.I., Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	
8.	Budi Azhari Jaenudin, S.Sos	Pranata Humas Ahli Pertama	

Kepala Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Majalengka,



Irwan



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani No.1 Kecamatan Majalengka,

Kabupaten Majalengka 45418

Telepon (0233) 281002 – 281443 Fax. (0233) 281475

Email : setda.majalengka@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 100.3.3.5/KEP.11-DISKOMINFO/2026

TENTANG

**KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 49 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, informasi publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang klasifikasi informasi dikecualikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2026 dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 75);
 7. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
 9. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/KEP.263-DISKOMINFO/2025 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2026 Nomor 000.8.3.4/BA.2/IKP/2026, tanggal 4 Juni 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



AERON RANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.5/KEP.11-DISKOMINFO/2026
TENTANG KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026.

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SEKRETARIAT DAERAH

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas

		Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas

12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas

16.	Kode akses /password aplikasi elektronik (SIPEKA dan SPEKTA)	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan Aplikasi	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak Terbatas
17.	• Data Dokumen Sistem Aplikasi SIPEKA dan SPEKTA; • Data Frekuensi Pada Setiap Site yang dimanfaatkan; • Database Aplikasi SIPEKA dan SPEKTA Sistem Aplikasi SIPEKA dan SPEKTA.	Pasal 17 huruf (c) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 2 ayat 1 Huruf G dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penyalahgunaan Aplikasi	Keamanan data keuangan Perangkat Daerah	Tidak Terbatas
18.	Rincian Laporan Kinerja dan Keuangan BUMD	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah	Penyalahgunaan penilaian yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak Terbatas

19.	Rincian Laporan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Penyalahgunaan data yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak Terbatas
20.	Keputusan Bupati yang Bersifat Individual	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengungkapkan data pribadi	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak Terbatas
21.	Dokumen Perkara di Pengadilan yang sedang berlangsung	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu/ menghambat proses penegakan hukum	Melindungi keamanan data dan memperlancar proses penegakan hukum	Sampai keluarnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>)
22.	Data Penerima Hibah	UU.No 8/1974 Tentang Keuangan Negara UU.No.1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan	Menimbulkan kecemburuan sosial	Menjaga kerahasiaan data penerima	Tidak Terbatas
23.	Agenda Kegiatan Pimpinan	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Dapat berpotensi disalahgunakan	Menghindari misinformasi akibat dinamika jadwal	Selama berlaku

Majalengka, 12 Juni 2026

Sekretaris Daerah
Kabupaten Majalengka,



Aeron Randi, AP. MP.

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAJALENGKA

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

	instansi penegak hukum lainnya				
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas

9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Tidak Terbatas
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Tidak terbatas
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas

14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	Risalah Rapat Paripurna Internal	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Peraturan DPRD Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Majalengka	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Tidak Terbatas

17.	Dokumen Rapat Internal Tertutup	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Peraturan DPRD Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Majalengka	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Tidak Terbatas
18.	Catatan Rapat Internal Fraksi, Badan Musyawarah dan Alat Kelengkapan DPRD lainnya	Peraturan DPRD Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Majalengka	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Tidak Terbatas
19.	Telaah Tenaga Ahli Fraksi DPRD	Peraturan DPRD Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Majalengka	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Tidak Terbatas
20.	Dokumen Harmonisasi	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan DPRD Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Majalengka	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Selama Undang-Undang berlaku

21.	Bukti/Keterangan Dalam Perkara Hukum yang Masih Berjalan	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan DPRD Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Majalengka	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai Perkara Hukum Selesai
-----	--	---	--	---	------------------------------

Majalengka, 3 Juni 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAJALENGKA



ANDI HERMAWAN, S.IP. MP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.197104031992021001

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
		Tahun 2009 tentang Kearsipan			
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadi nya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Berpotensi disalah gunakan oleh orang	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
		tentang Keterbukaan Informasi Publik	yang tidak bertanggungjawab		
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
16.	Dokumen pemeriksaan dan reviu	a. Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Membantu badan publiik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	20 Tahun
17.	Dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
		Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; c. Standar AAIPi Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit.			

Majalengka, 3 Juni 2026
Inspektur Kabupaten Majalengka,



HENDRA KRISNIAWAN, S.STP., M.Tr.I.P., CGCAE
NIP. 19780226 199703 1 002

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun	Melindungi data pribadi yang bersifat	Melindungi data pribadi yang bersifat	Tidak terbatas

	instansi penegak hukum lainnya	2008 tentang keterbukaan informasi publik	rahasia	rahasia	
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya	Tidak Terbatas

		1 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadi nya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara,	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara	Tidak terbatas

		b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	Informasi Dokumen Perjanjian Kerjasama/SPK yang masih dalam proses.	Pasal 17 huruf (b), huruf g, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018	Dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan muncul persaingan tidak sehat 1 tahun aktif	Dapat melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengurangi persaingan tidak sehat 2 tahun inaktif	Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

		tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah			
17.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sesuai dengan alasan yang tersirat dalam peraturan perundang undangan yang berlaku	Sesuai dengan alasan yang tersirat dalam peraturan perundang undangan yang berlaku	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
18.	Laporan Insiden Siber	Pasal 17 huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 2 ayat 1 huruf g dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019	Dapat menimbulkan kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi dari kerugian investasi kepentingan umum atau kerugian keuangan negara, serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	selama kode masih digunakan

		Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 15 Peraturan BSSN Nomor 10 tahun 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah			
19	Vulnerability Analysis, Information Technology Security Assessment and Penetration Testing	Pasal 17 huruf (c) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 2 ayat 1 Huruf G dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun	Dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan muncul persaingan tidak sehat 1 tahun aktif	Dapat melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengurangi persaingan tidak sehat 2 tahun inaktif	Tidak Terbatas

		2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 15 Peraturan BSSN Nomor 10 tahun 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah			
--	--	---	--	--	--

Majalengka, 3 Juni 2026
Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya
Kabupaten Majalengka,



Ikin Asikin, S.I.P., M.I.P., Kp
NIP.19740323 199803 1 004

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/ pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/ pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
		Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya	Tidak Terbatas

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
			penyimpangan keuangan negara	penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai;	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan	Tidak terbatas

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
	b. Dokumen pengaduan	pengawasan pemerintah. intern	korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	

Majalengka, 9 Juni 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka,



H. Arif Daryana

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
		Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat	Tidak terbatas

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
				terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	
16.	Dokumen penawaran kontrak pengadaan barang dan jasa	Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Menimbulkan persaingan tidak sehat antar penyedia	Menjaga keakuratan dan obyektifitas penilaian	Selama proses pengadaan barang dan jasa
17.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa	Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 66	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif	Penetapan nilai pengadaan yang akurat	Selama 1 tahun anggaran
18.	Kode akses/password aplikasi elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan penilaian yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak terbatas
19.	SPJ, SPM, SPP, SP2D, SP3B, DPA	UU.No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara	Mengungkapkan data keuangan	Menjaga kerahasiaan pembelanjaan	Tidak terbatas
20.	Rincian anggaran kegiatan	Pemendagri No.77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Menimbulkan penilaian tidak obyektif	Penetapan nilai anggaran yang akurat	Tidak terbatas
21.	Penetapan kinerja	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2017 Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggara Pemerintah Daerah	Mengungkap data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai	Tidak terbatas
22.	Data pribadi pegawai	Pasal 17 H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi pegawai	Tidak terbatas
23.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sesuai dengan alasan yang tersirat dalam peraturan	Sesuai dengan alasan yang tersirat dalam peraturan	Sesuai peraturan perundang-

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
			perundang undangan yang berlaku	perundang undangan yang berlaku	undangan yang berlaku
24.	Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga Berikut Dokumen Pendukungnya	Perpres No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Menimbulkan persaingan tidak sehat antar pihak ketiga	Menjaga kondusifitas kerjasama	Tidak terbatas
25.	Rincian RKA dan DPA Seluruh OPD pada lampiran Perda Perbup	Pemendagri No.77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Menimbulkan penilaian tidak obyektif/ penyalahgunaan data keuangan	Penetapan nilai anggaran yang akurat	Tidak terbatas
26.	Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	UU No. 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Data Dapat Disalahgunakan	Menjaga Keamanan Data	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
27.	LKPD Unaudited	UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Data yang dapat berubah sebelum audit BPK	Penetapan data yang lebih akurat	Selama proses menjadi audited

Majalengka, 03 Juni 2026

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Majalengka,



Drs. H. YAYAN SUMANTRI, M.Si.

NIP. 196707241986031002

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas

		3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari

		dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas

12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai;	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan Masyarakat tidak ragu melaporkan	Tidak terbatas

	b. Dokumen pengaduan	tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah					
1.	Data SPPT PBB-P2	a. Pasal 17 huruf g dan h UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 4 ayat (2) huruf e UU 27 tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi c. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. Tidak memiliki batas waktu kadaluwarsa. terbuka atau dapat diberikan apabila ada izin pemilik, kepentingan Hukum dan Kepentingan Negara
2.	Data Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	a. Pasal 17 huruf g dan h UU 14 Tahun 2008	Berpotensi disalahgunakan	Menjaga penyalahgunaan	a. Tidak memiliki batas waktu

		tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 4 ayat (2) huruf e UU 27 tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi c. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	oleh orang yang tidak berkepentingan	dari pihak yang tidak berkepentingan	kadaluwarsa. terbuka atau dapat diberikan apabila ada izin pemilik, kepentingan Hukum dan Kepentingan Negara
3.	Data Hasil Penilaian Objek Pajak Daerah	a. Pasal 17 huruf g dan h UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 4 ayat (2) huruf e UU 27 tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi c. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	• Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	• Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. Tidak memiliki batas waktu kadaluwarsa. terbuka atau dapat diberikan apabila ada izin pemilik, kepentingan Hukum dan Kepentingan Negara

4.	Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang: 1. Pembetulan dan Pembatalan atas Pajak Daerah 2. Keberatan dan Pengurangan atas Pajak Daerah	a. Pasal 17 huruf g dan h UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 4 ayat (2) huruf e UU 27 tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi c. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 5Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	• Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	• Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. Tidak memiliki batas waktu kadaluwarsa. terbuka atau dapat diberikan apabila ada izin pemilik, kepentingan Hukum dan Kepentingan Negara
5.	Formulir SSPD BPHTB (Surat Setoran Pajak Daerah – Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)	a. Pasal 17 huruf g dan h UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 4 ayat (2) huruf e UU 27 tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi c. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara	• Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	• Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. Tidak memiliki batas waktu kadaluwarsa. terbuka atau dapat diberikan apabila ada izin pemilik, kepentingan Hukum dan Kepentingan Negara

		Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah			
6.	Berkas Lampiran SSPD BPHTB: 1. KTP 2. KARTU KELUARGA 3. SPPT/SK. NJOP 4. SERTIFIKAT/AJB/GAMBAR UKUR TANAH 5. KET. JUAL BEL[/KWITANSI/AKTA PPJB 6. SLIP GAJI/PENGHASILAN 7. SURAT PENGAJUAN PINJAMAN KREDIT	a. Pasal 17 huruf g dan h UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 4 ayat (2) huruf e UU 27 tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi c. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. Tidak memiliki batas waktu kadaluwarsa. Terbuka untuk kepentingan Hukum dan Kepentingan Negara
Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan					
1.	Data rincian piutang pajak daerah	a. Pasal 17 huruf l dan huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.

		b. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara c. Pasal 44 ayat 1 huruf l Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawas.			
2.	Data rincian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	a. Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang	• Apabila informasi dipublikasikan dapat mengungkap rahasia negara	• Apabila informasi ditutup dapat melindungi rahasia negara	Tidak terbatas

		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi					
1.	IP Address	a. Pasal 17 (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE c. Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE d. Pasal 2 ayat 1 huruf g dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	Dapat melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	Tidak terbatas
2.	1. Data Perangkat Jaringan dan Server; 2. Data Topologi Jaringan; 3. Data Sistem Keamanan Jaringan; 4. Source Code Aplikasi;	a. Pasal 17 huruf (c) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 14	Dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Dapat melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan	Tidak terbatas

	5. Data Dokumen Sistem Aplikasi; 6. Data Frekuensi Pada Setiap Site yang dimanfaatkan; 7. Database Aplikasi Sistem Aplikasi.	Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik c. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik d. Pasal 2 ayat 1 Huruf G dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	dan muncul persaingan tidak sehat 1 tahun aktif	mengurangi persaingan tidak sehat 2 tahun inaktif	
--	---	---	--	--	--

Majalengka, 03 Juni 2026
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Majalengka,



Rachmat Gunandar, S.STP. M.Si.

NIP. 198102031999121001

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas

8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas

14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	Data Pribadi Siswa	Pasal 17 H Undang-undang N0 14 Tahun 2008	Data pribadi siswa dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi siswa	Tidak terbatas

17.	Nilai individual siswa	Pasal 17 H Undang-undang N0 14 Tahun 2008	Nilai individual siswa dapat disalahgunakan	Melindungi data Nilai individual siswa	Tidak terbatas
18.	Soal Ujian	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (informasi yang apabila dibuka dapat mengurangi efektivitas proses pengambilan keputusan publik)	Dapat menyebabkan kebocoran materi ujian, menghilangkan objektivitas penilaian, serta menurunkan kredibilitas penyelenggaraan pendidikan dan evaluasi hasil belajar.	Dapat melindungi kebocoran materi ujian, dan menjaga kredibilitas penyelenggaraan pendidikan	Sampai ujian selesai dilaksanakan dan soal tidak digunakan kembali.
19.	Kunci Jawaban Ujian yang belum diumumkan	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (informasi yang apabila dibuka dapat mengurangi efektivitas proses pengambilan keputusan publik)	Dapat dimanfaatkan untuk kecurangan akademik, mengganggu integritas proses evaluasi, serta merugikan peserta didik yang mengikuti ujian secara jujur.	Menghindari kecurangan akademik dan menjaga integritas proses ujian	Sampai seluruh proses penilaian dan pengumuman hasil selesai.
20.	Bank Soal Pendidikan	Pasal 17 huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka, bank soal dapat disalahgunakan, menyebabkan soal tidak lagi valid untuk pengukuran kompetensi, menimbulkan kebocoran soal pada	Dapat melindungi dari penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kebocoran pada pelaksanaan ujian selanjutnya	Selama bank soal masih digunakan dan belum dinyatakan terbuka oleh pejabat yang berwenang.

			asesmen berikutnya, dan menurunkan mutu sistem evaluasi pendidikan.		
--	--	--	---	--	--

Majalengka, 03 Juni 2026

Plh. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA,



Ir. Iman Firmansyah, M.M
NIP. 19680502 199803 1 009

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Berpotensi disalahgunakan oleh	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih	Tidak Terbatas

		tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	orang yang tidak bertanggungjawab	lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Tidak terbatas

		Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	Data pribadi SDM	Pasal 17 H Undang - Undang No.14 Tahun 2006	Data pribadi pegawai disalahgunakan	Melindungi data pribadi pegawai	Tidak Terbatas
17.	Data pribadi pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Pasal 17 Undang Undang no 14 th 2008, UU no 27 th 2022	Data pribadi pelaku usaha disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab	Perlindungan terhadap masyarakat terutama pelaku usaha	Tidak terbatas, sesuai UU yang berlaku

18.	Data BNBA kematian Ibu dan Bayi	Pedoman AMPSR	Data BNBA kematian ibu dan bayi di salahgunakan	Sesuai prinsip AMPSR bahwa harus menegakan budaya anonim (no name), tidak menyalahkan (no blame), tidak mempermalukan (no shame), tidak bisa dijadikan bukti hukum (no pro justitia)	Tidak terbatas
19.	Data BNBA status gizi balita	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Berisi data pribadi	Perlindungan data pribadi	Tidak Terbatas
20.	Data BNBA Peserta PBI	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkapkan data pribadi	Menjaga kerahasiaan peserta	Tidak Terbatas
21.	Data Ceka Kesehatan Gratis (CKG) di ASIK	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Mengungkapkan data pribadi	Menjaga kerahasiaan peserta	Tidak Terbatas
22.	Data pemeriksaan HPV DNA di NAR	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Mengungkapkan data pribadi	Menjaga kerahasiaan peserta	Tidak Terbatas

23.	Data BNBA pelaporan pelayanan Usia Produktif, HT dan DM	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Mengungkapkan data pribadi	Menjaga kerahasiaan peserta	Tidak Terbatas
24.	Data BNBA KIPI	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Mengungkapkan data pribadi, bisa disalah gunakan	Menjaga kerahasiaan peserta	Tidak Terbatas

Majalengka, 03 Juni 2026

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Majalengka,



Dr. H. Ida Heriyani, S.KM., M.H.
NIP. 19790611 200501 1 017

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2026

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas

		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
Bidang PIAK					
16.	Data Perseorangan Penduduk di SIAK (By Name By Address)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j - UU No. 24 Tahun 2013 pasal 79 ayat (3)	Dapat mengungkap rahasia pribadi maupun keluarga seseorang dan dapat dimanfaatkan untuk tindak kejahatan dan mencari keuntungan.	Melindungi hak pribadi maupun keluarga seseorang.	Batas waktu tidak terbatas

17.	Data Biometrik pribadi penduduk	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j - UU No. 24 Tahun 2013 pasal 86 ayat (1a)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang (sidik jari, iris mata, dan lain-lain) dan dapat dimanfaatkan untuk tindak kejahatan dan mencari keuntungan.	Melindungi hak pribadi maupun keluarga seseorang.	Batas waktu tidak terbatas
18.	Data Perangkat Jaringan dan Server, Data Topologi Jaringan dan Data Sistem Keamanan Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Pasal 17 huruf (c) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Membahayakan keamanan jaringan dan sistem SIAK.	Melindungi sistem SIAK dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	5 tahun dan terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis

Majalengka, 3 Juni 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Majalengka



IWAN DIRWAN, S. STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197908281999121001

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAJALENGKA

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas

9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas

14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas

Bidang Pemerintahan Desa

1	Laporan PertanggungJawaban ADD	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat memuat data pribadi perangkat desa, tanda tangan, nomor rekening, serta rincian belanja yang berpotensi disalahgunakan atau ditafsirkan keliru tanpa konteks hasil audit	Melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan informasi keuangan sebelum ada klarifikasi atau audit final; menjaga ketertiban dan stabilitas pemerintahan desa.	1 (satu) Tahun
---	--------------------------------	---	--	---	----------------

	Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Berpotensi mengganggu proses verifikasi administrasi dan dapat menimbulkan spekulasi atau tekanan publik sebelum dilakukan evaluasi dan persetujuan resmi	Menjamin objektivitas proses evaluasi dan verifikasi administrasi serta mencegah potensi intervensi atau konflik kepentingan	1 (satu) Tahun
	Permohonan pencairan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Dapat mengganggu proses administrasi dan penetapan alokasi serta menimbulkan kesalahpahaman apabila belum melalui proses verifikasi dan penetapan resmi	Menjamin tertib administrasi, akurasi perhitungan, dan kepastian hukum sebelum keputusan penyaluran ditetapkan secara resmi	1 (satu) Tahun

Bidang Pemberdayaan Potensi Desa

	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dan Pembangunan Desa

1.	Data pribadi pengurus BUMDes/BUMDes Bersama (NIK, alamat, rekening)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi disalahgunakan dan melanggar privasi	Melindungi hak pribadi dan keamanan pengurus	Tidak terbatas
2.	Laporan keuangan detail BUMDes yang memuat informasi sensitif usaha	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Dapat merugikan posisi bisnis BUMDes dalam persaingan usaha	Melindungi keberlangsungan usaha desa	Selama masih berlaku

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan					
1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial (Hibah PKK)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i	Menimbulkan spekulasi dan tekanan publik	Menjamin akuntabilitas proses administrasi	Sampai keluar hasil Audit

Majalengka, Juni 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Majalengka,



ABDUL AJID, S.Sos.,M.M.
NIP. 19710809 199203 1 006

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil	Pasal 17 huruf (h) Undang	Melindungi data	Melindungi data	Tidak terbatas

	kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	pribadi yang bersifat rahasia	pribadi yang bersifat rahasia	
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih	Tidak Terbatas

		tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	bertanggungjawab	lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang

		Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth,	a. Pasal 17 Undang	Dapat menimbulkan	Dapat melindungi	Tidak terbatas

	Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK				

14	Data Korban Kasus Kekerasan	UU No 27 Tahun 2022 , UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak	Rahasia/ Privasi Korban Terekspos	Privasi Korban Terlindungi	Jangka waktu tidak terbatas
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA					
15	Data Kelompok Kegiatan (POKTAN = BKB, BKL, UPPKA	UU 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Jangka waktu tidak terbatas
16	Data Elsismil Meliputi Jumlah dan Jenis Kelompok : Catin, Bumil, Baduta, Pascasalin	UU 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Jangka waktu tidak terbatas
17	Data Keluarga Resiko Stunting	UU 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Jangka waktu tidak terbatas

18	Data Tim Pendamping Keluarga	UU 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Jangka waktu tidak terbatas
19	Data Pertanggungjawabang Kegiatan di Bidang KSPK (DAK/DAU)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Jangka waktu tidak terbatas
BIDANG KELUARGA BERENCANA					
20	Data Pribadi Akseptor dan Calon akseptor KB	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data Pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Jangka waktu tidak terbatas
21	Data mutasi Alokasi baik manual maupun dari aplikasi SIRIKA dan Stoku	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menjaga agar tidak diperjual belikan oleh oknum	Jangka waktu tidak terbatas
22	Data Pribadi Kader IMP	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Jangka waktu tidak terbatas

23	Hasil Pemutakhiran Data dan Verifikasi validasi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat Proses Verifikasi dan Validasi hasil Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Melindungi agar data tidak disalahgunakan	Jangka waktu tidak terbatas
24	Data yang termuat di aplikasi SIGA	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi agar data tidak disalahgunakan	Jangka waktu tidak terbatas
25	Data TFR, Sekolah Siaga Kependudukan dan Kampung KB	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi agar data tidak disalahgunakan	Jangka waktu tidak terbatas

Majalengka, 3 Juni 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Majalengka


GUN GUN MOCH DHARMADI, SH., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680327 199603 1 003

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJALENGKA

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas

8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadi nya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas

14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	Data CPCL/Bantuan Benih	a. Pasal 17 huruf (b), huruf g, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Permentan No.29 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Bantuan	Informasi terbatas karena bisa berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

		Pemerintah (Banpem) lingkup Kementerian Pertanian.			
17.	Data CPCL / Bantuan Asintan LIP (Lahan Irigasi Pertanian)	a. Pasal 17 huruf (b), huruf g, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Permentan No.29 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah (Banpem) lingkup Kementerian Pertanian.	Informasi terbatas karena bisa berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbuka apabila ada perintah pengadilan /Lembaga pemerintahan secara tertulis.
18.	Data CPCL/ Bantuan Ternak	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

19.	Data/Bantuan Sarana dan Prasarana Hortikultura dan Perkebunan	a. Pasal 17 huruf (b), huruf g, dan huruf i, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Permentan No.29 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah (Banpem) lingkup Kementerian Pertanian.	Informasi terbatas karena bisa berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis.
-----	---	--	--	--	---

Majalengka, 03 Juni 2026

Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan

Perikanan
Kabupaten Majalengka,



H. GATOT SULAEMAN, AP., M.Si.

NIP. 19760528 199412 1 001

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Berpotensi disalahgunakan oleh	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih	Tidak Terbatas

		dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum	Tidak terbatas

	Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
Bidang Pengembangan Perdagangan					
1	NIHIL				
Bidang Pasar					
1	NIHIL				

Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga

1	Informasi Data Pribadi Pemilik UTTP	UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)	Adanya resiko Pencurian, penyebaran, atau penggunaan data pribadi orang lain tanpa hak	Terhindar dari penyalahgunaan data pribadi orang lain	1 (satu) tahun
---	-------------------------------------	--	--	---	----------------

Bidang Perindustrian

1	Informasi Data Pribadi Pelaku IKM	UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)	Adanya resiko Pencurian, penyebaran, atau penggunaan data pribadi orang lain tanpa hak	Terhindar dari penyalahgunaan data pribadi orang lain	1 (satu) tahun
---	-----------------------------------	--	--	---	----------------

Majalengka, 03 Juni 2026
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Majalengka,



DR. H. HERI RAHYUBI, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660822 198903 1 005

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

NO.	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

NO.	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
		2008 tentang keterbukaan informasi publik			
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas

NO.	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
		Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan

NO.	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
		tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya	Tidak Terbatas

NO.	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
			penyimpangan keuangan negara	penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas

NO.	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	Arsip Dokumen PBG/IMB	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
17.	Dokumen Rekomendasi Perizinan	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan h	Dapat menghambat proses penertiban rekomendasi izin	Menjaga independensi dan objektivitas proses penerbitan rekomendasi izin	a. Selama dokumen masih berlaku b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada

NO.	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
					instansi yang berwenang
18.	Inovasi yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Melindungi kekayaan intelektual	Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasi

Majalengka, 03 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Majalengka,



YUSANTO WIBOWO, S.IP., M.P

NIP. 19681009 199003 1 001

**DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026**

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas

		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

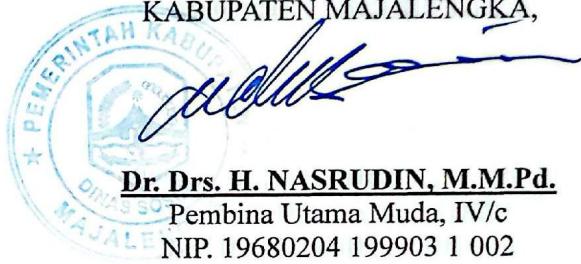
		Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari

		Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang	Tidak terbatas

				sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	
16.	Data individu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) penerima bantuan sosial	Pasal 17 H Undang-undang NO 14 Tahun 2008	Data pribadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) penerima bantuan sosial dapat disalahgunakan.	Melindungi dari penyalahgunaan data pribadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) penerima bantuan sosial.	Selama Undang-undang berlaku
17.	Data Pribadi Yang Terdapat Pada Aplikasi SIKS-NG	a. Pasal 17 (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE c. Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE d. Pasal 2 ayat 1 huruf g dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Data pribadi yang terdapat pada aplikasi SIKS-NG bisa disalahgunakan	Melindungi dari penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi SIKS-NG	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Majalengka, 12 Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAJALENGKA,



Dr. Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680204 199903 1 002

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KETENAGAKERJAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejahatan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan

		Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpanan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpanan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas

14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
Bidang Pelatihan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja					
16.	Rekomendasi pasport Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Undang-undang NO 27 Tahun 2022	Data pribadi (CPMI) dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi (CPMI)	Tidak terbatas
Bidang Koperasi					
17.	Data Identitas diri Anggota Koperasi	Undang-undang NO 27 Tahun 2022	Data Anggota Koperasi dapat disalahgunakan	Melindungi Data Anggota Koperasi	Tidak terbatas
Bidang UKM					
18.	Data Identitas Pelaku UMKM	Undang-undang NO 27 Tahun 2022	Data Pelaku UMKM dapat disalahgunakan	Melindungi Data Pelaku UMKM	Tidak terbatas
Bidang Hubungan Industrial					
19.	Data pribadi pekerja/buruh, meliputi: 1. Nomor induk kependudukan (NIK) 2. Riwayat kesehatan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Pelanggaran privasi. b. Risiko pencurian identitas.	a. Melindungi hak privasi pekerja.	Tidak terbatas

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN MAJALENGKA

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

		2008 tentang keterbukaan informasi publik			
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya	Tidak Terbatas

		I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadi nya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi	Tidak terbatas

		b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	perlindungan kekayaan intelektual	kepetingan perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	Data ePAKSI	Permen PU No. 12/PRT/M/2015	Berpotensi Data Dirubah	Menjaga Akurasi Data	Tidak terbatas
17.	Data Dokumen Pemohon PBG dan SLF	a. Pasal 17 Huruf (c) dan Huruf (i) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP b. Pasal 16 Huruf (b) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat Mengungkap Isi Akta Otentik yang Bersifat Pribadi	Dapat Melindungi Isi Akta Otentik yang Bersifat Pribadi	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Pengadilan / Lembaga Pemerintahan

		c. Pasal 25 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik d. Pasal 2 Ayat 1 Huruf (g) dan Ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
18.	Data Gambar Perencanaan Teknis Detail, As Built Drawing	a. Pasal 17 Huruf (c) dan Huruf (i) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP b. Pasal 16 Huruf (b) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik c. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh Pihak yang Tidak Berhak	Menjamin Kerahasiaan dan Menjaga Penyalahgunaan dari Pihak yang Tidak Berkepentingan	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Pengadilan / Lembaga Pemerintahan

		d. Pasal 2 Ayat 1 Huruf (g) dan Ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
19.	Hasil Audit/Pemeriksaan Internal (LHP)	Pasal 17 Huruf (c) dan Huruf (i) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Penyalahgunaan Oleh Pihak yang Tidak Berhak Atas Masalah yang Sebenarnya Sedang Dalam Proses Perbaikan Internal	Menjamin Kerahasiaan dan Menjaga Penyalahgunaan dari Pihak yang Tidak Berkepentingan	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Pengadilan / Lembaga Pemerintahan

Majalengka, 3 Juni 2026

✿ Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Majalengka,



Drs. AGUS PERMANA, M.P.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700322 199003 1 005

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MAJALENGKA

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian: 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas

8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas

		tentang Keterbukaan Informasi Publik			
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas

Permukiman					
16.	Data Gambar Perencanaan Teknis Detail, As Built Drawing	a. Pasal 17 Huruf (c) dan Huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Pasal 16 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. c. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. d. Pasal 2 Ayat 1 Huruf (g) dan Ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	Menjamin Kerahasiaan dan Menjaga Penyalahgunaan dari Pihak yang Tidak Berkepentingan.	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Pengadilan/Lembaga Pemerintahan
17.	Hasil Audit/Pemeriksaan Internal (LHP)	a. Pasal 17 Huruf (c) dan Huruf (i) Undang-Undang Nomor 14	Penyalahgunaan oleh Pihak yang tidak Berhak atas Masalah yang	Menjamin Kerahasiaan dan Menjaga	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari

		Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sebenarnya sedang dalam proses Perbaikan Internal.	Penyalahgunaan dari Pihak yang Tidak Berkepentingan.	Pengadilan/Lembaga Pemerintahan
Pertanahan dan PSU					
18.	Dokumen Pengadaan Tanah : a. Daftar Nominatif b. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

Majalengka, 3 Juni 2026
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Dan Pertanahan Kabupaten Majalengka,



Sidharta AP., M.P.
NIP. 197609231996031006

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAJALENGKA

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap	Tidak Terbatas

		Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan	Tidak terbatas

		b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	perlindungan kekayaan intelektual	perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas



Majalengka, 03 Juni 2026
 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Majalengka,

UJU GUSTAWAN, S.E.
 NIP. 196908081990031012

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas

6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas

15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat : c. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; d. Dokumen pengaduan	c. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; d. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	c. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak d. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	c. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan d. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas

Majalengka, 3 Juni 2026

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Majalengka,



RACHMAT KARTONO, S.STP.,M.Si
NIP. 198512232006021001

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DINAS PERHUBUNGAN

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas

		Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan	Tidak terbatas

		b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	perlindungan kekayaan intelektual	perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas

Bidang Lalu Lintas

16.	Detail spesifikasi teknis sistem CCTV dan jaringan pendukung pengendalian lalu lintas	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf a	Dapat mengetahui detail teknis sistem	Dapat berpotensi disalahgunakan dan mengganggu keamanan lalu lintas	Tidak Terbatas
17.	Dokumen Teknis Rinci Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas	a. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf	Dapat mengetahui Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas suatu proyek	Dapat melindungi strategi bisnis dan desain teknis internal pengembang	Tidak Terbatas

		b. Undang-undang No. 22 Tahun 2009			
Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan Dinas Perhubungan					
18.	Data Pribadi Pemilik Izin Trayek (NIK, Alamat, No. HP)	a.UU No. 27 Tahun 2022 (PDP) b.UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Dapat mengetahui statistik jumlah total armada dan rute yang tersedia	Melindungi privasi pemilik izin dari potensi tindak kriminal	Tidak Terbatas
19.	Data Profil Internal & Kontak Person Pihak Pengelola TK/PAUD peserta SALUD	a.UU No. 27 Tahun 2022 (PDP) b.UU No. 14 Tahun 2009 Pasal 17 huruf g & h	Dapat mengetahui Daftar Nama TK/PAUD yang telah mengikuti edukasi keselamatan	Melindungi data pribadi kepala sekolah/guru (nomor pribadi) dari internal sekolah yang bersifat rahasia untuk menghindari spamming atau tindak kriminal	Tidak Terbatas
20.	Data pribadi pengemudi, pemilik kendaraan dan pelaku usaha transportasi	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Dapat mengetahui informasi pelaku usaha transportasi	Dapat berpotensi tindak kejahatan dan melanggar privasi	Tidak Terbatas
Bidang Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					
21.	Peta Jaringan Kabel PJU & Panel PJU	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c	Dapat mengetahui sebaran titik lampu PJU untuk keamanan warga	Mencegah pencurian kabel tembaga atau merusak panel listrik	Tidak Terbatas

22.	Rincian Setoran PAD/Retribusi per Titik atau Per Jukir Spesifik	a.Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf b b.Undang-undang No. 1 Tahun 2022	Dapat mengetahui total Target dan Realisasi PAD Tahunan	Melindungi rahasia data wajib retribusi dan persaingan usaha	Tidak Terbatas
-----	---	--	---	--	----------------

Majalengka, Juni 2026
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Majalengka,



ANDIK SUJARWO, A.P., M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 197309181993111001

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Berpotensi disalahgunakan oleh	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih	Tidak Terbatas

		tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	orang yang tidak bertanggungjawab	lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Tidak terbatas

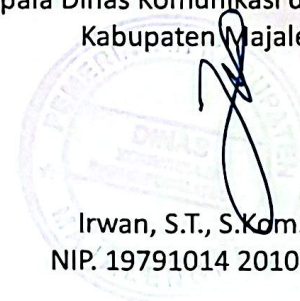
		Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	Laporan Kontra Penginderaan	a. Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 15 Peraturan BSSN Nomor 10 tahun 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk	Apabila informasi dipublikasikan dapat mengungkap rahasia negara	Apabila informasi ditutup dapat melindungi rahasia negara	Tidak terbatas

		pengamanan informasi di pemerintah daerah			
17.	Laporan Insiden Siber	a. Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE c. Pasal 2 ayat 1 huruf g dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik d. Pasal 15 Peraturan BSSN Nomor 10 tahun 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah	Dapat menimbulkan kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan negara, mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi dari kerugian investasi kepentingan umum atau kerugian keuangan negara, serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
18.	Jaring Komunikasi Sandi	a. Pasal 17 (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 30 Undang-Undang Tahun 2008 tentang ITE	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi	Tidak terbatas

		c. Pasal 2 ayat 1 huruf g dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik d. Pasal 15 Peraturan BSSN Nomor 10 tahun 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah			
19.	Vulnerability Analysis, Information Technology Security Assesment and Penetration Testing	a. Pasal 17 huruf (c) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik c. Pasal 25 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan muncul persaingan tidak sehat 1 tahun aktif	Dapat melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengurangi persaingan tidak sehat 2 tahun aktif	Tidak terbatas

		d. Pasal 2 ayat 1 huruf g dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik e. Pasal 15 Peraturan BSSN Nomor 10 tahun 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah			
--	--	---	--	--	--

Majalengka, 3 Juni 2026
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka,



Irwan, S.T., S.Kom., M.M
NIP. 19791014 201001 1 006

**DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

		tentang keterbukaan informasi publik			
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	Perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	Perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung-jawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya	Tidak Terbatas

		2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap	Tidak Terbatas

			lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung-jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas

			kekayaan intelektual		
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas

Majalengka, 6 Juni 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Majalengka,



H. Wawan Sarwanto, S.T., M.H.
NIP. 19800514 200501 1 010

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
TAHUN 2026**

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih	Tidak Terbatas

		Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	bertanggungjawab	lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terja dinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan	Tidak terbatas

			kekayaan intelektual	perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
Bidang PLPA					
14.	Data Pengguna Aplikasi SRIKANDI	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Pasal 26	Terancamnya data pribadi pengguna	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
15.	Data Pengelolaan Surat di Aplikasi SRIKANDI	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Pasal 26	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
16.	Data Password Pengguna Aplikasi SIKN JIKN	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan	Tidak Terbatas

		2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Pasal 26	pemerintah	pemerintahan	
17.	Data Pengelolaan Arsip Dinamis, Vital dan Statis pada Aplikasi LONTAR	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Pasal 26	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
18.	Source Code Aplikasi; Data Dokumen Sistem Aplikasi; Database Aplikasi Sistem Aplikasi.	Pasal 17 huruf (c) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 16 huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi source code aplikasi sampai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak	Tidak Terbatas
19.	IP Address Private/Internet Protocol	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	terancamnya keamanan perangkat serta data	Melindungi akses dan keamanan jaringan	Tidak Terbatas
20.	Sistem Manajemen Basis Data	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi	Terancamnya keamanan basis data	Menjaga Keamanan Basis Data	Tidak Terbatas

		Publik Pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)			
21.	Daftar Arsip Vital yang bersifat tertutup	a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan b. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
22.	Daftar Arsip Statis yang bersifat tertutup	a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan b. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
23.	Daftar Arsip Dinamis yang bersifat Rahasia dan Sangat Rahasia	a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan b. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
24.	Arsip Kependudukan antara lain : 1. Berkas/Register Akta Kelahiran;	a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang	Mengungkap berkas pribadi yang bersifat	Mengungkap berkas pribadi	tetapi dapat dibuka untuk :

	2. Berkas/Register Akta Perkawinan; 3. Berkas/Register Akta Kematian; dll.	Kearsipan b. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis	rahasia	yang bersifat rahasia	1. Kepentingan akuisisi, perlindungan dan penyelamatan arsip oleh petugas yang berwenang 2. Kepentingan Kabupaten Majalengka melalui rekomendasi Bupati dan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan 3. Kepentingan pengadilan jika terdapat surat dari Ketua Pengadilan 4. Dinyatakan lain oleh undang- undang
Bidang Perpustakaan					
25.	Data Anggota Perpustakaan	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia Tidak terbatas	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia Tidak terbatas	Tidak terbatas

26.	Lokasi Server perangkat serta data tidak terbatas	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik	terancamnya keamanan perangkat serta data	Melindungi perangkat serta data tidak terbatas	Tidak Terbatas
-----	---	---	---	--	----------------

Majalengka, Juni 2026
Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Majalengka,



Ono Haryono

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas

		Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadi nya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepetingan	Tidak terbatas

				perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/200 8 tentang kode etik aparatus pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggag melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	Surat Pengaduan Masyarakat	Pasal 17 Huruf I dan j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat merugikan proses penyusunan dan b. Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang- undang lainnya dirahasiakan / dan atau tidak boleh diungkap	a. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan menjaga b. Informasi yang menurut Undang-undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap	Tidak terbatas
17.	Dokumen dan Informasi Perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 Huruf I dan j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menghambat proses hukum/	a. Memperlancar proses hukum/	Tidak Terbatas

		Keterbukaan Informasi Publik	penyelidikan /penyidikan dan b. Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-undang lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap	penyelidikan /penyidikan dan b. Menjaga informasi yang menurut Undang-undang lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap	
18.	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda / Perkada	Pasal 17 Huruf a, I, dan j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menghambat proses hukum/ penyelidikan /penyidikan dan b. Dapat merugikan proses penyusunan dan c. Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-undang lainnya dirahasiakan / dan atau tidak boleh diungkap	a. Memperlancar proses hukum/ penyelidikan /penyidikan dan b. Memperlancar proses hukum/ penyelidikan /penyidikan dan c. Menjaga informasi yang menurut Undang-undang lainnya dirahasiakan / dan atau tidak boleh diungkap	Tidak terbatas
19.	Berita acara Pemeriksaan	1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 17 Huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menghambat proses hukum/ penyelidikan /penyidikan dan b. Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-undang	a. Memperlancar proses hukum/ penyelidikan /penyidikan dan b. Menjaga informasi yang menurut Undang-undang lainnya dirahasiakan /	Tidak Terbatas

			lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap	atau tidak boleh diungkap	
20.	Data pelanggar Perundang – undangan Daerah	Pasal 17 huruf a dan h Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengganggu hak dari pelanggar b. Dapat menghambat proses hukum / penyelidikan / penyidikan dan c. Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang undang lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap	a. Melindungi privasi individu pelanggar b. Memperlancar proses hukum / penyelidikan / penyidikan dan c. Menjaga informasi yang menurut Undang Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap	Tidak terbatas
21.	Data kegiatan intelejen terkait dengan ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	Pasal 17 Huruf c, I, dan j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat Membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan / atau daerah / wilayah b. Dapat merugikan proses penyusunan dan c. Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-undang lainnya dirahasiakan /	a. Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan / atau daerah / wilayah b. Menjaga agar proses penyusunan dan c. Menjaga informasi yang menurut Undang-undang lainnya dirahasiakan /	Tidak Terbatas

			dan atau tidak boleh diungkap	dan atau tidak boleh diungkap	
22.	Rencana dan Target operasi	Pasal 17 huruf a Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	a. Menyebabkan bocornya informasi operasi b. Menghambat proses penegakan Perundang- undangan daerah Membahayakan petugas	c. Keberhasilan operasi d. Memperlancar dalam proses operasi Menjaga keamanan petugas	Sampai dengan berakhirnya operasi

Majalengka, Juni 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MAJALENGKA



Drs. TOTO PRIHATNO., S.Sos., MP.
NIP. 197009281991011002

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas

8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas

		Keterbukaan Informasi Publik			
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
Bidang Poldagri dan Ormas					
1.	Dokumen Ormas, LSM, OKP dan Yayasan Nirlaba lainnya di Kabupaten Majalengka yang bersifat sensitif	Pasal 17 huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan	Dapat melindungi stabilitas keamanan di daerah	Tidak terbatas

		tentang Keterbukaan Informasi Publik	perlindungan keamanan daerah		
Bidang Kesbang					
1.	Informasi yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban daerah	Pasal 17 huruf (d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan keamanan daerah	Dapat melindungi stabilitas keamanan di daerah	Tidak terbatas
2.	Informasi yang dalam proses terkait kebijakan politik dan rancangan rekomendasi kepada Kepala Daerah	Pasal 17 huruf (d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan keamanan daerah	Dapat melindungi stabilitas keamanan di daerah	Tidak terbatas

Majalengka, 04 Juni 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Majalengka,



H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos., M.P.
NIP. 19711202 199202 1 001

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menghambat proses penyusunan/penga	Mengamankan proses	Tidak terbatas

		tentang keterbukaan informasi publik	mbilan kebijakan	pengambilan kebijakan	
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14	Mengakibatkan terjadinya persaingan	Membangun persaingan usaha	Sampai dengan adanya

		Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	usaha tidak sehat	yang sehat	persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Berpotensi disalah gunakan oleh orang	Melindungi kerahasiaan	Tidak terbatas

		Keterbukaan Informasi Publik	yang tidak bertanggungjawab	dokumen	
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	Data Spasial Khusus	•UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 •Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
17.	Data Penyaluran Logistik	Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2012	Berpotensi terjadinya	Mencegah penimbunan atau	Sampai proses pendistribusian/

			penimbunan atau gangguan keamanan	gangguan keamanan	penyaluran bantuan selesai
18.	Data Penerimaan Bantuan Sarana Fisik	Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana	Berpotensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Sampai proses pendistribusian/ penyaluran bantuan selesai

Majalengka, 09 Juni 2026

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA,



Dr. H. AGUS TAMIM, S.T.,M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196611091997031001

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

RSUD MAJALENGKA

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
			Sekretariat		
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

		tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	orang yang tidak bertanggungjawab	lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Berpotensi disalahgunakan oleh	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih	Tidak Terbatas

		dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Tidak terbatas

		Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16	Dokumen Rekam Medis (pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis, pengobatan, pemeriksaan, tindakan, dan prognosis serta pelayanan lain yang diberikan kepada pasien)	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Informasi Publik apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat mengungkap rahasia pribadi (melindungi kerahasiaan rekam medis pasien)	Menjaga keamanan keutuhan dan kerahasiaan data pasien)	1. Tidak Terbatas 2. Kecuali untuk keluarga pasien dan pasien bila diperlukan

		3. Pasal 296 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Pasal 297 ayat (3) dan Pasal 301 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Pasal 735 ayat (1) huruf c, Pasal 778 ayat (4), Pasal 785 PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 6. Pasal 17 huruf h angka 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
17	Laporan Insiden Keselamatan Pasien	1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11	Petugas menjadi enggan untuk melaporkan KTD, KNC, KTC, KPSC, Kejadian Sentinel	1. Menumbuhkan budaya keselamatan (safety culture) di rumah sakit. Budaya keselamatan ditandai dengan partisipasi penuh semua staf untuk melaporkan bila ada insiden	1. Tidak Terbatas 2. Hanya Pihak Rumah Sakit yang mengetahui

		Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 4. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Mutu Rumah Sakit		keselamatan pasien tanpa ada rasa takut untuk melaporkan dan disalahkan (no blame culture). 2. Agar Pengukuran budaya keselamatan pasien dapat dilakukan oleh rumah sakit dengan cara survei budaya keselamatan pasien setiap tahun. Budaya keselamatan pasien juga dikenal sebagai budaya yang aman, yakni sebuah budaya organisasi yang mendorong setiap individu anggota staf (klinis atau administratif) melaporkan hal-hal yang menghawatirkan tentang keselamatan atau mutu pelayanan	
--	--	---	--	---	--

18	Data Base Server	1. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan akses oleh pihak yang tidak berwenang serta dari setiap bentuk pemrosesan data yang tidak sah	Mempertimbangkan secara menyeluruh potensi risiko dan kerugian yang dapat terjadi dari kegiatan pemrosesan data.	Tidak Terbatas
19	Nota-Nota Pembayaran	1. Pasal 1 angka 28, Pasal 40, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 2. Pasal 17 huruf h angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. 3. Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang	Mengungkap data pribadi badan publik dan penyedia rekanan atau pihak ketiga yang bersifat rahasia yaitu nomor rekening bank	Melindungi data pribadi badan publik dan pihak ketiga yang bersifat rahasia yaitu nomor rekening bank	dibuka, dalam hal : 1. Untuk kepentingan perpajakan 2. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana 3. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. 4. Dalam rangka tukar menukar

		Pengklasifikasian Informasi Publik.			informasi antar bank. 5. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.
20	Dokumen Kontrak	1. Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 2. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 3. Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.	Menimbulkan peluang pemanfaatan informasi dalam persaingan usaha tidak sehat	Menjaga perlindungan dokumen kontrak dari pihak yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha pemilik informasi, untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat.	Tidak Terbatas
21	Kode Akses Elektronik	1. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan pelayanan rumah sakit	Mengamankan sistem pelayanan rumah sakit	1. Tidak terbatas 2. Kode Akses Elektronik

		Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik			
--	--	--	--	--	--

Majalengka, 3 Juni 2026
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Majalengka



dr. EGGA BRAMASTA AKIDAPI MM.RS
NIP. 19790505 201001 1 024

**DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RSUD CIDERES KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026**

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Sekretariat					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

		informasi publik			
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas

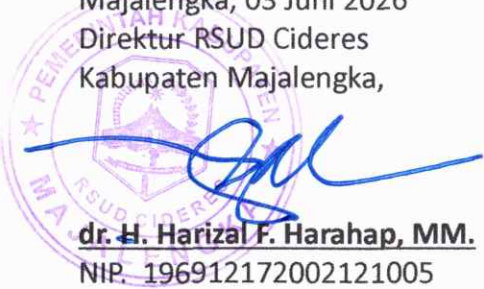
		Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil siding Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat :	a. Undang – Undang	a. Penyalahgunaan oleh	a. Menjamin kerahasiaan	Tidak terbatas

	a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	
16.	• Identitas lengkap pasien (nama, alamat, No. Rekam Medis). • Riwayat medis detail (diagnosis spesifik individu, hasil laboratorium). • Dokumentasi asuhan keperawatan (Catatan Keperawatan/RM) • Foto/Video pasien yang memperlihatkan identitas	a. Pasal 351 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan b. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas (kecuali pasien dan keluarga)

		c. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
--	--	--	--	--	--

Majalengka, 03 Juni 2026
Direktur RSUD Cideres
Kabupaten Majalengka,



dr. H. Harizal F. Harahap, MM.
NIP. 196912172002121005



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALAGA

Alamat : Jalan Raya Majalengka - Cikijing, Blok Cipeucang I Desa Talaga Wetan
Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka 45463
Tlp. (0233) 3600015 Email: rsudtalaga@gmail.com

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

RSUD TALAGA

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Tata Usaha					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas

		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
8.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
9.	Data Pengguna & password Srikandi	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE	Dapat digunakan pihak yang tidak berwenang untuk mengakses sistem dan menyalahgunakan data	Menjaga keamanan sistem informasi dan dokumen elektronik	Tidak Terbatas
10	Data Pengguna & password TTE	Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat digunakan untuk pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan tanda tangan elektronik	Menjaga keamanan dokumen elektronik dan identitas pengguna	Tidak Terbatas
Keuangan					
11	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya	Tidak Terbatas

		I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		penyimpangan keuangan negara	
12	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadi nya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
14	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
15	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
16	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
17	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai;	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/200	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan	Tidak terbatas

	b. Dokumen pengaduan	8 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	
Pelayanan Kesehatan					
18	Laporan Insiden Keselamatan Pasien	Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien	Dapat menimbulkan kesalahpahaman, keresahan masyarakat, serta mengungkap identitas pasien dan petugas yang terlibat	Melindungi kerahasiaan pasien dan petugas serta mendukung perbaikan mutu pelayanan	Tidak Terbatas
19	Data Rekam Medik a. identitas Pasien; b. hasil pemeriksaan fisik dan Penunjang; c. diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan; d. nama dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.	undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 351 ayat 1	Dapat melanggar hak privasi pasien dan berpotensi menimbulkan diskriminasi	Melindungi kerahasiaan data kesehatan pasien	Tidak Terbatas

Pelayanan Penunjang					
20	Jumlah dan penyimpanan obat-obatan psikotropika dan narkotika di Rumah Sakit	Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	Dapat dimanfaatkan untuk tindak pencurian, penyalahgunaan, atau peredaran gelap narkotika	Menjaga keamanan persediaan obat dan mencegah penyalahgunaan	Tidak Terbatas

Majalengka, 05 Juni 2026

Direktur RSUD Talaga
Kabupaten Majalengka,



dr. Gita Parameswara Putri, M.M
NIP. 198605152014092001

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN ARGAPURA**

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

		2008 tentang keterbukaan informasi publik			
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya	Tidak Terbatas

		I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadi nya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas

15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas

		Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Argapura, 4 Juni 2026

Camat Argapura
Kabupaten Majalengka,



RIDWAN MOCHAMAD RAMDHANI, ST., M.Si.
NIP. 19800809 200901 1 004

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN BANJARAN**

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Berpotensi disalahgunakan oleh	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih	Tidak Terbatas

		tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	orang yang tidak bertanggungjawab	lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Bandwith management; kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan dan Sistem Aplikasi	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Tidak terbatas

		Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas

16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Majalengka, 04 Juni 2026

Camat Banjaran

Kabupaten Majalengka,



ABDUL HANAN, S.Sos., M.M.

NIP. 197407052009011003

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN BANTARUJEG**

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas

8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas

14.	Bandwidth management; kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan dan Sistem Aplikasi	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas

17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Majalengka, 05 Juni 2026

Camat Bantarujeg
Kabupaten Majalengka,




RADEN MOHAMMAD SHODDIQ, S.AP.
NIP. 196904191988031002

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KECAMATAN CIGASONG

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, Kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Berpotensi disalahgunakan oleh	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih	Tidak Terbatas

		tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	orang yang tidak bertanggungjawab	lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Tidak terbatas

		Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas

16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Majalengka, 4 Juni 2026

Camat Cigasong

Kabupaten Majalengka,



OO. TAOPIK, S.K.M., M.M.

NIP. 198011072008011004

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN CIKIJING**

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Berpotensi disalahgunakan oleh	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih	Tidak Terbatas

		tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	orang yang tidak bertanggungjawab	lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Bandwith management; kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan dan Sistem Aplikasi	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Tidak terbatas

		Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas

16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Majalengka, 4 Juni 2026

Camat Cikijing

Kabupaten Majalengka,



Rony Setiawan, S.IP., CGCAE

Pembina Tingkat I

NIP. 197104221991011001

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KECAMATAN CINGAMBUL

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	Perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Berpotensi disalahgunakan oleh	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih	Tidak Terbatas

		tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	orang yang tidak bertanggungjawab	lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Tidak terbatas

		Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas

18.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
19.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
20.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
21.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Majalengka, 4 Juni 2026

Camat Cingambul

Kabupaten Majalengka,



NONO HERYANO,S.IP.,Kp.

Pembina Tk. I

NIP.19681228 199403 1 005

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

		informasi publik			
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas

		Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Bandwith management; kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan dan Sistem Aplikasi	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas

15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas

		Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Majalengka, 4 Juni 2026

Camat Dawuan

Kabupaten Majalengka,



ENDANG HERMAWAN, S.STP., M.Si.

NIP. 198204102001121002

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN JATITUJUH**

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Berpotensi disalahgunakan oleh	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih	Tidak Terbatas

		tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	orang yang tidak bertanggungjawab	lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Tidak terbatas

		Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas

16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas



Majalengka, Juni 2026

Camat Jatituh
Kabupaten Majalengka,

AGUS MULYANTO. S.KM.,M.A.P.

NIP.197807222007011010

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN JATIWANGI
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026**

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya	Tidak Terbatas

		I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Bandwith management; kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan dan Sistem Aplikasi	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas

15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas

		Keterbukaan Informasi Publik			
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Majalengka, 5 Juni 2026

Camat Jatiwangi

Kabupaten Majalengka,



Ade Anung Iyaharja, A.Md., LLAJ., S.Sos., M.Si., Kp.
Pembina Tk.I

NIP. 197807192003121002

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KECAMATAN KADIPATEN

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Berpotensi disalahgunakan oleh	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih	Tidak Terbatas

		tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	orang yang tidak bertanggungjawab	lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Bandwith management; kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan dan Sistem Aplikasi	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Tidak terbatas

		Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas

16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Majalengka, 4 Juni 2026

Camat Kadipaten

Kabupaten Majalengka,



JOHANSYAH, SE.

NIP. 197408011999031008

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KECAMATAN KASOKANDEL

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas

9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK) c.	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas

17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas



Majalengka, 04 Juni 2026
Camat Kasokandel
Kabupaten Majalengka,

Dr. YUSMANTO, S.Pd., M.T.
NIP. 197312041998031001

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KECAMATAN KERTAJATI

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Berpotensi disalahgunakan oleh	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih	Tidak Terbatas

		tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	orang yang tidak bertanggungjawab	lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Tidak terbatas

		Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas

16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Majalengka, 4 Juni 2026

Camat Kertajati
Kabupaten Majalengka,



RIZKY GINANJAR SATYAGRAHA, S.STP,M.Si
NIP. 19890908 201206 1 001

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KECAMATAN LEMAHSUGIH

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Berpotensi disalahgunakan oleh	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih	Tidak Terbatas

		tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	orang yang tidak bertanggungjawab	lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadi nya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Tidak terbatas

		Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas

16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Majalengka, 04 Juni 2026

Calet Lemahsugih
Kecamatan Majalengka,



Pril Pratama, S.STP., M.Si

NIP. 19850504 200412 1 001

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KECAMATAN LEUWIMUNDING

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Berpotensi disalahgunakan oleh	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih	Tidak Terbatas

		tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	orang yang tidak bertanggungjawab	lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Tidak terbatas

		Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas

16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Majalengka, 4 Juni 2026

Camat Leuwimunding

Kabupaten Majalengka,



H. WAWAN KURNIAWAN, S.Sos.MT
NIP.19690716 199503 1 004

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN LIGUNG**

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas

6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Bandwith management; kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan dan Sistem Aplikasi	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas

15.	Pengaduan Masyarakat: a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Majalengka, 04 Juni 2026

Kamat Ligung



ABDUL GONI, S.H., MH.

NIP. 198010152005011007

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN MAJA
TAHUN 2026**

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

		keterbukaan informasi publik			
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya	Tidak Terbatas

		Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Bandwith management; kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan dan Sistem Aplikasi	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan	Tidak terbatas

		2008 tentang ITE, pasal 30	perlindungan kekayaan intelektual	perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas

17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Maja, 4 Juni 2026

Camat Maja

Kabupaten Majalengka,



H. ASEP ZAKI MULYATNO, S.KM., M.KM.

Pembina Tk.I

NIP. 19730409 199503 1 004

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KECAMATAN MAJALENGKA

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Berpotensi disalahgunakan oleh	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih	Tidak Terbatas

		tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	orang yang tidak bertanggungjawab	lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas

16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Majalengka, 23 Juni 2026
Camat Majalengka
Kabupaten Majalengka,


AAY KANDAR NURDIANSYAH
NIP. 19820521200121001

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KECAMATAN MALAUSMA

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun	Melindungi data pribadi yang bersifat	Melindungi data pribadi yang bersifat	Tidak terbatas

	instansi penegak hukum lainnya	2008 tentang keterbukaan informasi public	rahasia	rahasia	
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambil kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambil kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambil kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya	Tidak Terbatas

		I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadi nya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang - Undang	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi	Tidak terbatas

		Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	perlindungan kekayaan intelektual	kepetingan perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas

		Keterbukaan Informasi Publik			
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Majalengka, 4 Juni 2026
Camat Malausma Kabupaten Majalengka,



Dede Hakimurosad



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN PALASAH

Alamat Jalan raya Waringin No. 188 Telp./Fax. (0233) 881076 Palasah Majalengka45475

email : kecpalasah2014@gmail.com website: www.palasah.kec.majalengkakab.go.id

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN PALASAH

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan	Tidak Terbatas

		Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas

12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Bandwith management; kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan dan Sistem Aplikasi	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna	Tidak Terbatas

		Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		terjamin keamanan serta keutuhannya	
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas



Majalengka, 05 Juni 2026
 Camat Palasah
 Kabupaten Majalengka,

DR. EKA RAHADIAN, S.Sos
 Pembina IV/a
 NIP. 19830123 201001 1 012

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KECAMATAN PANYINGKIRAN

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya	Tidak Terbatas

		2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terja dinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya	Tidak Terbatas

			penyimpangan keuangan negara	penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a;	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	a. Menjamin kerahasiaan dan	Tidak terbatas

	korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia	Tidak Terbatas

		tentang Keterbukaan Informasi Publik		pekerjaan/kegiatan pemerintahan	
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Ditetapkan di : Panyingkiran

Pada tanggal : 4 Juni 2026

CAMAT PANYINGKIRAN,



Hj. NITA DWI WAHYUNI SUDRADJAT

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KECAMATAN RAJAGALUH

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

		informasi publik			
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas

		Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Bandwith management; kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan dan Sistem Aplikasi	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas

15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas

		Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Majalengka, 4 Juni 2026

Camat Rajagaluh

Kabupaten Majalengka,



Bani Fadilah Ranandar, S.STP., M.A.P.

NIP. 198603222010011006

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KECAMATAN SINDANG

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Berpotensi disalahgunakan oleh	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih	Tidak Terbatas

		tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	orang yang tidak bertanggungjawab	lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Bandwith management; kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan dan Sistem Aplikasi	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Tidak terbatas

		Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas

16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Majalengka, 5 Juni 2026

Camat Sindang

Kabupaten Majalengka,



ANIH REHNAWATI, S.STP.,M.Si

NIP. 19850503 200312 2 001

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KECAMATAN SINDANGWANGI

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas

		Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
3.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas

12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak	Tidak terbatas

		Keterbukaan Informasi Publik			
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Majalengka, 4 Juni 2026
 Camat Sindangwangi
 Kabupaten Majalengka,



FAZRI PRIA PERDANA, SH
 NIP. 198403092009011001

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KECAMATAN SUKAHAJI

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Berpotensi disalahgunakan oleh	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih	Tidak Terbatas

		tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	orang yang tidak bertanggungjawab	lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (I) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (I) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Manajemen Jaringan dan Bandwidth, Akses Sistem Elektronik, Sistem Keamanan Informasi, serta Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan	Tidak terbatas

		Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	
15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas

16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Majalengka, 4 Juni 2026
 Camat Sukahaji
 Kabupaten Majalengka,

SUPARTY NINGSIH, S.IP, M.A.P.
 Pembina
 NIP. 19880220 200701 2 002

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KECAMATAN SUMBERJAYA

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Tidak Terbatas

		2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Bandwith management; kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan dan Sistem Aplikasi	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas

15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas

18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Majalengka, 5 Juni 2026

Camra Sumberjaya,



WAHYU SUDIANTO, S.IP.
NIP. 198304252010011010

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KECAMATAN TALAGA

NO	BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			TERBUKA	TERTUTUP	
Kasubag Umum dan Keuangan					
1.	Data Pribadi ASN, meliputi: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Data Kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening Tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak Kekayaan pribadi yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. SKP 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Mutasi 5. Pensiun 6. Administrasi Kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat	Tidak terbatas

	instansi penegak hukum lainnya	2008 tentang keterbukaan informasi publik		rahasia	
5.	Disposisi	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Nota Dinas	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Arsip/dokumen naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat rahasia.	perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya	Tidak Terbatas

		Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		penyimpangan keuangan negara	
9.	Rincian Harga Penawaran (HPS) dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
10.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

		1999 tentang Larangan Praktek Monopoli			
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara sampai keluar hasil audit	Tidak Terbatas
12.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen hasil sidang Baperjakat Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
13.	DPA, DPPA, RKA, Perkin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
14.	Bandwith management; kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan dan Sistem Aplikasi	a. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 30	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan Negara serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Tidak terbatas

15.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelaporan dan isi pelaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK)	Tidak terbatas
16.	SK Perangkat Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terancamnya data pribadi	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak Terbatas
17.	Rincian Anggaran Bantuan Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
16.	Laporan Hasil Monev Anggaran Desa	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak Terbatas
17.	Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK dan Layanan E-KTP	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Terancamnya data pribadi masyarakat	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas

		Informasi Publik			
18.	Data Keterangan Ahli Waris	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi masyarakat	Tidak Terbatas
19.	Data Surat Tanah	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Majalengka, 08 Juni 2026
Camat Talaga Kabupaten
Majalengka,



Agus Heriyanto

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALANGKA,



AERON RANDI